

Peranan Dunia Usaha dan Kewiraswastaan dalam Pembentukan Bangsa

Daoed JOESOEUF

Wiraswasta dan pengusaha di dalam pekerjaannya sehari-hari tidak mungkin diabstrakkan dari bangsa di mana mereka tergolong. Karena, secara fundamental hubungan ekonomi selalu merupakan campuran antara pertukaran barang dan perbandingan kekuatan. Perbedaan dan ketidaksepadanan dalam kekuatan para pelaku ekonomi yang mengadakan hubungan tetap merupakan faktor yang ikut menentukan dan ini lebih-lebih berlaku sejauh hubungan tersebut terletak di bidang perdagangan (pertukaran) internasional. Baik harga maupun kuantum yang disepakati di bidang ini selalu ditandai oleh faktor kekuatan tersebut, demikian pula arus dan keseimbangan barang dan jasa yang terbentuk di situ. Dari cara melihat seperti ini kiranya dapat disimpulkan beberapa tanggapan-ekonomi mengenai "bangsa."

Suatu bangsa dalam dirinya merupakan satu kombinasi kegiatan dan usaha ekonomi (industri) para warganya. Isi, dimensi dan pengelompokan kegiatan tersebut ke dalam berbagai sektor (pertanian, pertambangan, perindustrian, administrasi, dan lain-lain) menentukan struktur neraca pembayarannya terhadap luar negeri, kesanggupannya mempengaruhi bangsa lain dan kemampuannya menerima ataupun menolak pengaruh dari luar.

Suatu bangsa, dipandang dari sudut lokalisasi usaha dan kegiatan ekonomi para warganya, merupakan gabungan daerah maju dan terbelakang, kombinasi jaringan transpor dan zona penggerak pembangunan. Sifat, letak dan bobot elemen-elemen itu di dalam keseluruhannya menentukan apakah kegiatan bangsa ini akan sampai melampaui batas kebangsaannya atau menerima kegiatan lanjutan dari bangsa lain.

Suatu bangsa adalah kombinasi dari kekuatan-kekuatan ekonomi dan finansial. Kombinasi ini merupakan dasar kemampuannya untuk mengenga-

ruhi partnernya di bidang internasional dan atau menghadapi pengaruh yang hendak didesakkan oleh pihak lain kepadanya. Kemampuan ini diterapkan baik melalui pasaran modal, uang ataupun mythe uang nasionalnya.

Di bidang pertukaran barang dan jasa antar-bangsa, perkembangan teknologi telah mengubah "ekonomi internasional" menjadi *ekonomi-dunia* melalui perubahan yang ditimbulkannya dari ekonomi "faktor produksi" menjadi ekonomi "pengetahuan." Bangsa yang tidak turut ambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi-dunia tersebut berarti menulis resep bagi dekadensi ekonomi nasionalnya sendiri. Turut berkecimpung dalam ekonomi-dunia berarti tidak mengasingkan dan menutup diri secara autarkis tetapi berarti secara sadar mengaitkan perkembangan ekonominya pada perkembangan ekonomi bangsa lain. Ternyata sangkut-paut ekonomi bangsa-bangsa itu sudah begitu rupa sehingga dapat dikatakan bahwa kini praktis tidak ada satu bangsa pun yang benar-benar berdiri sendiri, sesedikitnya tidak di semua bidang ekonomi.

Bagi pelaku ekonomi individual, besar kecilnya hasil yang dapat ditariknya dari keturutsertaannya di bidang lalu-lintas pertukaran internasional, tergantung sekali dari keseluruhan struktur di mana dia tergolong; dengan perkataan lain, tergantung pada "bangsa" mana dia termasuk. Sebaliknya, struktur yang berbeda-beda dari bangsa tidak hanya menentukan perbedaan hasil pelaku ekonomi individual, tetapi juga menentukan akibat dan pengaruh yang diterima bangsa itu sendiri dari keturutsertaannya dalam ekonomi dunia. Dengan perkataan lain, ekonomi dunia memberikan pengaruh yang asimetrik terhadap bangsa-bangsa sesuai dengan "struktur" yang membentuk tubuh bangsa itu sendiri. Maka itu bagi sesuatu bangsa yang ingin turut serta dalam ekonomi dunia, dan memang hampir tidak mungkin untuk tidak turut, sebaiknya lebih dahulu meneliti dengan sempurna struktur yang membentuk dirinya. Apakah struktur yang dipunyainya merupakan modalitas yang kuat (ampuh) atau lemah untuk terjun di dalam ekonomi dunia.

Ekonomi dunia seperti yang kita alami sekarang dilahirkan dan dibesarkan oleh suatu wawasan politik yang tumbuh dan berkembang dengan pesatnya di Eropa Barat sesudah Perang Dunia Kedua, yang mulai tahun 1974 dalam berbagai kesempatan saya sebut dengan satu istilah yang saya kira sekarang ini masih tetap berlaku, yaitu "nasionalisme baru."¹ Nasionalisme baru (di Eropa Barat) inilah yang secara esensial memelopori pembentukan ekonomi dunia yang semakin lama menjadi semakin kukuh dengan pertumbuhan kedewasaannya.

¹ Lihat antara lain, Daed Joesoef, "Knowledge Economy and World Economy," *Indonesian Quarterly*, Vol. II, No. 2 (January 1974), dan "The New International Economic Order," *Indonesian Quarterly*, Vol. V, No. 1 (January 1977).

Bila ada "nasionalisme baru" tentu ada bandingannya yang layak disebut sebagai "nasionalisme lama." Memang ada nasionalisme lama ini, tetapi dalam kenyataannya berusia tidak "setua" berbagai bentuk utama dari politik Eropa di bidang kebangsaan dan ketatanegaraan. Abad ke-19 merupakan suatu peralihan dari Eropa-Kerajaan yang dibentuk oleh dinasti sesuatu keluarga ke Eropa-Kebangsaan yang dibentuk oleh rakyat yang berdaulat. Namun dalam berbuat begini rakyat tersebut mengambil-alih pula sebagian dari hasrat-hasrat kemutlakan dari monarki di tahap akhir purna-feodalnya itu.

Di masyarakat Eropa abad ke-19 itu terdapat dua golongan utama, yaitu kaum tani yang sudah dibebaskan dari kekuasaan tuan-tuan tanah dan kaum menengah yang untuk sebagian besar terdiri dari wiraswasta dan pengusaha kecil serta sebagian kecil cendekiawan dan pekerja otak (knowledge workers). Mereka ini turut memupuk perkembangan nasionalisme lama dengan wawasan kaumnya masing-masing.

Sumbangan kaum tani pada perkembangan politik nasional Eropa ketika itu berupa wawasan kewilayahan. Sumbangan seperti ini ternyata kemudian berakibat fatal karena ia merumuskan keamanan, progres dan kepentingan nasional dalam artian luasnya tanah -- di satu benua di mana setiap jengkal tanah sudah ada yang memilikinya. Mengingat teknologi pertanian belum maju ketika itu, satu-satunya harapan petani untuk memperoleh keberuntungan ekonomi adalah dengan jalan mendapat tanah garapan yang lebih luas. Rasa "kekurangan tanah" ini dihayati pula oleh pemerintahnya masing-masing dan dijadikan pegangan dalam kebijakan luar negerinya. Berhubung dengan itu letak garis perbatasan nasional menjadi masalah yang diperdebatkan antar-bangsa. Sampai Perang Dunia Kedua, tuntutan Hitler untuk memperoleh "Lebensraum" bagi Jerman di sebelah timur negerinya segera didukung oleh rakyat Jerman yang merasa bahwa energi nasionalnya sangat terkekang oleh batas-batas negerinya yang ada.

Kaum menengah Eropa mempunyai juga kecenderungan politik yang sama. Dalam berpolitik mereka meminta dari pemerintahnya masing-masing campur tangan sesedikit mungkin di samping bantuan sebanyak mungkin untuk mendapatkan pasaran dan mempertahankannya bila berhasil direbut. Pengaruh mereka ini akhirnya menimbulkan pertarungan ekonomi di Eropa dan penjajahan di luar Eropa. Kaum menengah Eropa kiranya menganut pula pendirian kaum tani yang serba mutlak atas apa yang dimiliki. Sebab, biar bagaimanapun kaum tani ini adalah "leluhur" mereka. Namun ketika dilanjutkan ke kebijakan luar negeri, pendirian seperti itu menjadi pendirian "nasionalisme lama" tentang kedaulatan yang tidak terbatas.

Sama halnya dengan Eropanya dinasti, dewasa ini Eropanya petani dapat dikatakan sudah lenyap. Setiap tahun jumlah petani terus menurun. Betapapun rendahnya pendidikan formal yang ditempuh petani untuk menjalankan

fungsi profesionalnya, ia sadar bahwa sekarang ini lebih banyak pupuk, lebih banyak mesin, pasaran yang lebih luas -- dan barangkali dukungan harga dari pihak pemerintahnya -- merupakan jalan yang lebih baik ke arah progres ke-timbang luasnya tanah.

Di pihak lain, kaum menengah mendorong kelahiran dan penggunaan teknologi modern di Eropa. Memang baru kira-kira 40 tahun yang terakhir ini dapat dilihat betapa implikasi teknologi telah mengubah struktur sosial dan sikap politik benua tua Eropa. Ia kini sadar bahwa tanah dan sumber-sumber fisik bukan lagi merupakan faktor-faktor penghambat bagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bangsa. Untuk menaikkan derajat hidupnya ia tidak perlu lagi berkembang secara horisontal dengan berpijak pada tanah bangsa lain karena tujuan yang sama kini dapat dicapainya dengan bergerak secara vertikal ke dalam ruang progres teknologi yang tidak terbatas.

Dengan begini lahirlah apa yang saya sebut sebagai "nasionalisme baru" di Eropa, suatu wawasan politik yang dihidupi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Di bidang ketatanegaraan ia telah memupuk pengertian "negara-bangsa," yang sebelum Perang Dunia Kedua praktis tidak dikenal. Di bidang ekonomi, ia telah membentuk "ekonomi pengetahuan" di dalam negeri dan "ekonomi dunia" di luar negeri, yaitu dua bentuk ekonomi yang sebelum Perang Dunia Kedua juga tidak dikenal.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas kiranya dapat dikatakan bahwa ada tempat yang terhormat bagi pengusaha dan wiraswasta di masyarakat nasional kita. Tempat mereka ini di masyarakat bisnis yang dalam dirinya merupakan bagian (sub-community) dari masyarakat nasional kita. Melalui kegiatan profesional mereka ini masyarakat bisnis menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan karenanya memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi pembentukan pendapatan nasional. Kelimpahan material yang dihasilkan ini pada gilirannya mensubsidi hal-hal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan intelektual-spiritual yang pada pokoknya dihasilkan oleh masyarakat-bagian lainnya (masyarakat religius, masyarakat artistik, masyarakat ilmiah, dan lain-lain).

Mengingat tempat kedudukan mereka ini, pengusaha dan wiraswasta sebenarnya tidak hanya dapat, bahkan seharusnya ikut berperan-serta secara aktif dalam usaha pembentukan bangsa (nation building). Mereka secara sadar dan sistematis harus membuat bangsa kita berstruktur ekonomi yang sepadan untuk mampu turut-serta secara menguntungkan dalam kegiatan ekonomi dunia, sesedikitnya untuk sanggup menghadapi akibat atau pengaruh yang asimetrik dari perputaran ekonomi dunia itu. Untuk tujuan nasional ini mereka seharusnya membuat ekonomi nasional Indonesia menjadi paralel dengan ekonomi-ekonomi nasional lainnya yang "merajai" ekonomi dunia tersebut melalui pembinaan dunia usaha yang mereka pimpin dan miliki

masing-masing. Dengan perkataan lain, mereka harus berusaha membuat ekonomi nasional Indonesia menjadi "ekonomi pengetahuan" (knowledge economy) melalui pembinaan dunia usaha yang mereka pimpin dan miliki masing-masing.

Demi pembentukan bangsa melalui pembentukan ekonomi pengetahuan ini, yang dapat dilakukan oleh para pengusaha dan wiraswasta kita berupa empat hal pokok.

Pertama, menerapkan sebanyak mungkin teknologi baru dalam proses produksi yang menjadi urusan bisnis-industrialnya dan tidak hanya puas dengan metode serta prosedur tradisional yang sudah diketahui. Dengan menerapkan teknikalitas hasil ilmu pengetahuan yang terus berkembang ini, para pengusaha dan wiraswasta tidak mengabaikan unsur penting yang telah membina nasionalisme baru di kalangan golongan menengah Barat dan yang kiranya telah menjawai pembentukan ekonomi dunia.

Kedua, pengusaha dan wiraswasta Indonesia harus mempekerjakan sebanyak mungkin pekerja otak (knowledge workers) di perusahaannya masing-masing. Berkat training formal yang telah dialaminya, biasanya pekerja otak inilah yang sangat berminat pada hasil-hasil ilmu pengetahuan terapan dan karenanya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan tersebut terus-menerus. Kepada mereka ini harus diberikan kesempatan oleh majikannya untuk turut serta dalam forum-forum diskusi internasional yang membahas masalah-masalah teknologi.

Ketiga, dunia usaha sebaiknya mulai membangun pusat-pusat penelitiannya sendiri bagi keperluan perkembangan bisnis jangka panjang di masa depan. Di samping ini mereka selayaknya turut memberikan sumbangan finansial atau peralatan secara teratur kepada lembaga-lembaga riset di lingkungan pendidikan tinggi. Dengan begini terciptalah kaitan fungsional yang erat antara masyarakat bisnis dan masyarakat ilmiah. Kaitan seperti ini terbukti sangat bermanfaat bagi pembentukan bangsa di Eropa Barat, Amerika Serikat dan Jepang, karena secara fungsional masyarakat ilmiahlah yang menghasilkan pemikiran-pemikiran baru, sedangkan masyarakat bisnislah yang secara profesional menerapkan teknikalitas yang dilahirkan oleh pemikiran-pemikiran ilmiah tersebut. Berkat kerjasama seperti ini terciptalah basis domestik dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu diperlukan oleh bangsa kita untuk dapat turut bermain dengan menguntungkan dalam ekonomi dunia. Mengingat bobot serta kemampuan hasil-hasil ilmu pengetahuan di segala bidang kehidupan dan penguasaan yang mendekati mutlak oleh negara-negara maju atas ilmu pengetahuan, kiranya dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan inilah yang merupakan garis pertama pertahanan dari negara-bangsa yang relatif baru merdeka di abad ke-21 mendatang. Bila negara-bangsa yang terakhir disebut ini lalai, maka garis pertama pertahanan

ini akan menjadi sekaligus garis terakhir dari pertahanan keberadaannya di peta dunia.

Keempat, secara sendiri-sendiri atau secara patungan bersama-sama mendirikan Pusat Latihan Teknik (PLT) yang tidak hanya terbuka bagi karyawan perusahaan tetapi juga terbuka bagi umum, khususnya remaja dan pemuda yang memang berhasrat meningkatkan keterampilannya. Usaha seperti ini pasti mempunyai manfaat sosial dan manfaat ekonomi.

Manfaat sosial berupa pelaksanaan asas keadilan, karena melalui training seperti ini asas keadilan yang dituju oleh pembangunan kita dapat lebih terjamin. Betapa tidak. Keadilan di sini tercapai bukan melalui pembagian pendapatan yang lebih merata, tetapi melalui penggunaan lebih banyak oleh pembangunan sumber energi yang praktis dimiliki oleh setiap warga negara, yaitu tenaga kerja manusia. Artinya, dengan meningkatkan mutu teknis tenaga kerja dari "unskilled" menjadi sesedikitnya "rather skilled," kita tidak hanya membantu menaikkan kapasitas mencari nafkah individual, tetapi melipatgandakan modal manusia negeri kita.

Bila direnungkan lebih mendalam, sebenarnya training besar-besaran di bidang teknologi juga mempunyai arti ekonomi yang besar. Adalah satu kenyataan bahwa salah satu kekurangan yang fundamental bagi usaha pembangunan Indonesia adalah kurangnya tenaga teknis menengah yang harus melaksanakan apa-apa yang sudah diputuskan di atas. Teknisi menengah ini, di negeri mana pun, pada dasarnya tidak dihasilkan dalam lingkungan pendidikan formal.

Sekolah-sekolah paling jauh hanya dapat melatih ke arah penguasaan peralatan analisa, baik yang bersifat matematik maupun filosofis. Teknisi menengah ditempa dan dihasilkan di pusat-pusat kegiatan produksi dan bisnis. Di negeri-negeri yang sudah maju pusat-pusat kegiatan tersebut tidak kurang jumlahnya, baik yang berupa pabrik, galangan kapal, maskapai bangunan, asuransi, perbankan, biro administrasi, dan lain-lain. Di negeri yang belum maju seperti Indonesia, justru tempat-tempat penggemblengan tenaga teknis menengah yang seperti itu sangat kurang jumlahnya, sedangkan perkembangan pusat-pusat kegiatan produksi dan bisnis tersebut pada gilirannya sangat tergantung pada ada tidaknya tersedia tenaga teknis menengah tadi. Alhasil terjadilah satu lingkaran yang tak berujung-pangkal.

Maka untuk dapat ke luar dari lingkaran yang mencekik ekonomi ini perlu ditingkatkan kegiatan training keterampilan teknik dan industrial arts dan guna membiayai kegiatan yang terang menelan banyak biaya itulah diperlukan suatu usaha patungan berupa Pusat Latihan Teknik. Dengan begini kita berarti memasukkan teknologi itu sendiri ke dalam masyarakat dan bukannya hanya puas dengan mengimpor hasil-hasil teknologi yang berkembang dan dikembangkan di negeri lain.